

**RESPON GERAKAN PEREMPUAN DI YOGYAKARTA TERHADAP  
ISU-ISU NASIONAL PADA MASA ORDE BARU**

**(1980-1998)**



**Oleh:**

**Ana Roida, S.Hum.**

**NIM: 14.205.100.94**

**TESIS**

Diajukan kepada Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga  
untuk Memenuhi Salah Satu Syarat guna Memperoleh

Gelar Master of Arts (M.A)

Program Studi Interdisciplinary Islamic Studies

Konsentrasi Sejarah Kebudayaan Islam

**YOGYAKARTA**

**2018**

## PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Ana Roida, S.Hum.  
NIM : 14.205.100.94  
Jenjang : Magister  
Program Studi : Interdisciplinary Islamic Studies  
Konsentrasi : Sejarah Kebudayaan Islam

menyatakan bahwa naskah tesis ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Yogyakarta, 23 Agustus 2018

Saya yang menyatakan,



Ana Roida, S.Hum.

NIM: 14.205.100.94

STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA

## PERNYATAAN BEBAS PLAGIASI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Ana Roida, S.Hum  
NIM : 14.205.100.94  
Jenjang : Magister  
Program Studi : Interdisciplinary Islamic Studies (IIS)  
Konsentrasi : Sejarah Kebudayaan Islam

menyatakan bahwa naskah tesis ini secara keseluruhan benar-benar bebas dari plagiasi. Jika di kemudian hari terbukti melakukan plagiasi, maka saya siap ditindak sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

Yogyakarta, 23 Agustus 2018

Saya yang menyatakan,



Ana Roida, S.Hum.

NIM: 14.205.100.94

STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA

## NOTA DINAS PEMBIMBING

Kepada Yth.,  
Direktur Pascasarjana  
UIN Sunan Kalijaga  
Yogyakarta

*Assalamu'alaikum wr. wb.*

Disampaikan dengan hormat, setelah melakukan bimbingan, arahan, dan koreksi terhadap tesis yang berjudul:

**RESPON GERAKAN PEREMPUAN DI YOGYAKARTA TERHADAP  
ISU-ISU NASIONAL PADA MASA ORDE BARU  
(1980-1998)**

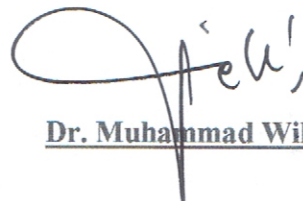
Yang ditulis oleh:

Nama	: Ana Roida, S.Hum.
NIM	: 14.205.100.94
Jenjang	: Magister
Program Studi	: Interdisciplinary Islamic Studies
Konsentrasi	: Sejarah Kebudayaan Islam

Saya berpendapat bahwa tesis tersebut sudah dapat diajukan kepada Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta untuk diujikan dalam rangka memperoleh gelar Magister Studi Islam.

*Wassalamu'alaikum wr. wb.*

Yogyakarta, 23 Agustus 2018  
Pembimbing



**Dr. Muhammad Wildan, M. A**



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA  
PASCASARJANA


### PENGESAHAN

Tesis Berjudul : Respon Gerakan Perempuan Di Yogyakarta Terhadap Isu-  
Isu Nasional Pada Masa Orde Baru (1980-1998)  
Nama : Ana Roida, S. Hum  
NIM : 1420510094  
Jenjang : Magister (S2)  
Program Studi : *Interdisciplinary Islamic Studies*  
Konsentrasi : Studi Kebudayaan Islam  
Tanggal Ujian : 24 Agustus 2018

Telah dapat diterima sebagai salah satu syarat memperoleh gelar *Master of Arts*  
(M.A)

Yogyakarta, 29 Agustus 2018

Direktur,

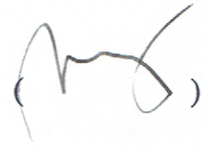
  
**Prof. Noorhaidi, MA., M.Phil., Ph.D.**  
NIP-19711207 199503 1 002

**PERSETUJUAN TIM PENGUJI  
UJIAN TESIS**

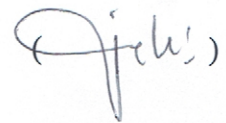
Tesis berjudul : Respon Gerakan Perempuan Di Yogyakarta Terhadap  
: Isu-Isu Nasional Pada Masa Orde Baru (1980-1998)  
Nama : Ana Roida, S. Hum  
NIM : 1420510094  
Jenjang : Magister (S2)  
Program Studi : *Interdisciplinary Islamic Studies*  
Konsentrasi : Studi Kebudayaan Islam

Telah disetujui tim penguji ujian munaqosyah

Ketua/Penguji : Dr. Nina Mariani Noor, SS., MA.



Pembimbing/Penguji : Dr. Muhammad Wildan, M.A.



Penguji : Prof. Dr. Muhammad Abdul Karim,  
M.A. M.A.



diuji di Yogyakarta pada tanggal

Waktu : 10.00 – 11.00 WIB

Hasil/Nilai : A- / 87

Predikat Kelulusan : Memuaskan / Sangat Memuaskan / Cum Laude\*

\* Coret yang tidak perlu

## ABSTRAK

Orde Baru mengkonstruksi sebuah wacana diskursus gender yang mendasarkan diri pada *ibuisime*. *Ibuisime* adalah citra baru yang dibentuk terhadap perempuan bahwasanya peran dan aktifitas yang layak perempuan hanyalah kegiatan domestik. Politik gender ini dikukuhkan dengan membentuk PKK, Dharma Wanita dan depolitisasi atau penghilangan hak atau peran politik organisasi-organisasi perempuan yang mana pada masa Revolusi Kemerdekaan kita banyak menjumpai sejumlah organisasi perempuan salah satunya seperti Persatuan Wanita Indonesia, Gerakan Wanita Indonesia, Konggress Wanita Indonesia yang secara aktif mengadvokasi isu anti-poligami, anti-perkawinan dini, anti-perdagangan perempuan terhadap pemerintah. Orde Baru dengan pemerintahan yang cenderung represif dan otoriter memang membarangus gerakan perempuan.

Pada 1984 Indonesia mendandatangani konvensi PBB mengenai penghentian segala bentuk diskriminasi terhadap perempuan. Konvensi ini memberi kesempatan organisasi perempuan untuk mulai muncul dan aktif di permukaan dalam memperjuangkan hak-haknya salah satunya di Yogyakarta ada beberapa organisasi yang aktif merespon isu dan kebijakan pemerintah diantaranya 'Aisyiyah, Muslimat, Yayasan Annisa Swasti (Yasanti), dan Rifka Annisa.

Tesis ini mencoba meneliti beberapa organisasi perempuan di Yogyakarta baik itu dari organisasi keagamaan atau NGO yang berdedikasi untuk melakukan pemberdayaan dan advokasi pada isu-isu gender dalam beberapa kasus pada masa Orde Baru yakni Keluarga Berencana, pembunuhan Marsinah, penggusuran Kedung Ombo dan pemerkosaan Mei 1998. Penelitian ini menggunakan pendekatan politik dan sejarah, Adapun sebagai pisau analisis peneliti menggunakan teori Joan Wallach Scott *women history* dalam mengungkap tabir ketidakadilan dalam berbagai relasi perempuan dengan modal, militer, kehancuran ekologi, dan sebagainya. Data Tesis ini diperoleh melalui penelitian lapangan dan wawancara langsung kepada pendiri, dan para aktifis yang konsen dalam penanganan isu terhadap perempuan di dua organisasi keagamaan 'Aisyiyah dan Muslimat serta dua Lembaga Swadaya Masyarakat Yasanti dan Rifka Annisa.

**Kata Kunci: Respon, Gerakan Perempuan, Isu Nasional, Orde Baru**

## KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, segala puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT, atas segala karunia dan Ridlo-Nya, sehingga tesis dengan Judul “Respon Gerakan Perempuan di Yogyakarta terhadap Isu-Isu Nasional Pada Masa Orde Baru (1980-1998)” ini dapat terselesaikan. Ide untuk menulis tesis ini bermula saat empat tahun yang lalu penulis bersama Yayasan Annisa Swasti aktif dalam melakukan pemberdayaan dan penyadaran hak-hak perempuan. Oleh karena itu, penulis terinspirasi untuk menuliskan sejarah yang berpusat pada perempuan atau *gynocentris* menjadi ide awal dalam penulisan ini.

Banyak kendala teknis maupun dalam non teknis dalam menyelesaikan tesis ini sehingga menjadi seperti wujudnya sekarang ini. Oleh karena itu, pada kesempatan ini penulis menyampaikan rasa hormat dan menghaturkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada Dr. Muhammad Wildan, M.A atas bimbingan arahan, dan waktu yang telah diluangkan kepada penulis untuk berdiskusi selama menjadi dosen pembimbing

Kepada Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga, Prof. Noorhaidi Hasan selaku Direktur Pascasarjana, para dosen, dan staf saya mengucapkan banyak terimakasih. Tidak lupa penulis juga mengucapkan terimakasih kepada para narasumber Ibu Chairatun Chisaan, ibu Siti Syamsiyatun, ibu Amin Muftiyannah, Sri



Kusniyati, Ap. Agustina, Hikmah Diniyah yang ikut berperan hingga terwujudnya tulisan ini.

Penulis juga mengucapkan terima kasih kepada staff dan relawan baik di Yasanti dan Rifka Annisa yang meluangkan waktu mereka untuk berdiskusi dengan penulis terkait kasus-kasus pelanggaran Hak-hak perempuan pada masa Orde Baru.

Kepada teman-teman di UIN Sunan Kalijaga: Sidiq, Zaid Munawar, Ikhsan, Aziz, Farida terimakasih untuk diskusi-diskusinya di warung kopi membahas tentang penelitian ini dan obrolan ringan lainnya ketika di Jogja.

Semua anggota (Percepatan Pembangunan Masyarakat Desa) P3MD Kabupaten Pati terutama Ula Toriqul Ummah, Feriyanto A.H, Arif Wahyudi terimakasih sudah atas support dan dukungannya selama ini.

Terakhir, dan paling penting, ucapan terima kasih kepada ayah dan ibu, Bapak Nur Fuad (Alm.) dan Ibu Ishomah, di Pati, tak lupa suami tercinta Ahmad Wahyu Sudrajad dan anakku Zanubia. Beserta saudara kandung dan suami penulis: Yus, Lia, Roved, untuk dukungan dan doanya. Tesis ini dan jenjang pendidikan yang telah penulis tempuh di Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga penulis dedikasikan untuk mereka.

Yogyakarta, 23 Agustus 2018

Saya yang menyatakan,

**Ana Roida, S.Hum**

NIM: 14.205.100.94

## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL .....	i
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN.....	ii
HALAMAN PERNYATAAN BEBAS PLAGIASI .....	iii
NOTA DINAS PEMBIMBING.....	iv
ABSTRAK .....	v
KATA PENGANTAR.....	vi
DAFTAR ISI.....	viii

### BAB I :PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Rumusan Masalah.....	7
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian .....	7
D. Kajian Pustaka .....	8
E. Landasan Teori.....	11
F. Metode Penelitian .....	14
G. Sistematika Pembahasan.....	17

### BAB II: KONSTRUKSI GENDER PADA MASA ORDE BARU

A. Ibuisme PKK dan Dharma Wanita: Diskursus Gender Pada Masa Orde Baru .....	20
B. Depolitisasi Terhadap Gerakan Perempuan .....	27
C. Kebangkitann Gerakan Perempuan 1980-an .....	31

### BAB III: ORGANISASI-ORGANISASI PEREMPUAN DI YOGYAKARTA

A. 'Aisyiyah .....	41
B. Muslimat.....	45
C. Yayasan Annisa Swasti .....	50
D. Rifka Annisa.....	55

### BAB IV : RESPON ORGANISASI-ORGANISASI PEREMPUAN TERHADAP ISU-ISU NASIONAL

A. Pengendalian Penduduk atau Keluarga Berencana (KB) .....	63
B. Kedung Ombo .....	70
C. Marsinah.....	76
D. Kekerasan 1998.....	82

### BAB V:PENUTUP

A. Kesimpulan .....	89
B. Saran.....	91

DAFTAR PUSTAKA.....	92
---------------------	----

DAFTAR RIWAYAT HIDUP.....	98
---------------------------	----

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang

Tesis ini membahas tentang sejarah lokal gerakan perempuan pada masa Orde Baru di Yogyakarta. Secara khusus, studi ini menitikberatkan pada kajian terhadap empat organisasi perempuan yaitu 'Aisyiyah, Muslimat, Yasanti, dan Rifka Annisa dalam merespon sejumlah isu nasional pada masa Orde Baru seperti program pengendalian penduduk melalui program KB, peristiwa Kedung Ombo, Marsinah, dan kekerasan terhadap perempuan pada pemberontakan Mei 1998. Peneliti berpendapat bahwa dalam gerakannya 'Aisyiyah dan Muslimat cenderung terkooptasi oleh rezim Orde Baru, sedangkan Yasanti dan Rifka Annisa cenderung mandiri dengan jaringan (Lembaga Swadaya Masyarakat) LSM mereka dan mendapatkan dukungan baik moril maupun material dari dunia internasional, bersamaan dengan tumbuhnya semangat gerakan perempuan pada dekade 1980-an.

Perpindahan kekuasaan dari Orde Lama Sukarno ke rezim Orde Baru Suharto mempunyai dampak signifikan terhadap gerakan perempuan di Indonesia. Sebelum Orde Lama, Indonesia menyaksikan tumbuhnya gerakan perempuan yang aktif mengkampanyekan hak-hak perempuan termasuk dalam bidang politik. Beberapa organisasi tersebut antara lain:

1. Persatuan Wanita Republik Indoneisa (Perwari) adalah salah satu organisasi gerakan perempuan yang berdiri pasca kemerdekaan. Organsasi ini merupakan metamorfosis dari Fujinkai, kelompok istri

bentukan Jepang yang diketuai oleh istri pejabat tinggi setempat di seluruh Indonesia. Pada masa Orde Lama, organisasi ini tercatat yang paling aktif menentang presiden Soekarno berpoligami.<sup>1</sup>

2. Persatuan Wanita Kristen Indonesia (PWKI) adalah organisasi yang didirikan pada tahun 1946. Dalam perjalanannya, keanggotaan PWKI menurun drastis. Mereka tidak lagi melibatkan diri dalam PWKI demi karir suami. Mereka dituntut menjadi anggota Dharma Wanita atau organisasi yang terkait dengan pekerjaan suami. Monoloyalitas ini mengakibatkan keterlibatan perempuan dalam gerakan wanita Kristen menurun. Beberapa peneliti menggarisbawahi bahwa penyatuan organisasi-organisasi perempuan adalah bentuk pemberangusan ide yang sangat bertentangan dengan asas demokrasi.<sup>2</sup>

3. Kongres Wanita Indonesia (Kowani) adalah badan federasi gabungan beberapa organisasi yang berdiri pada tahun 1946 di Solo. Tujuan utama Kowani adalah selain mendukung revolusi nasional, ia juga aktif dan konsen dalam menyuarakan masalah pelacuran dan kegiatan sosial dalam penyantunan anak-anak.<sup>3</sup>

---

<sup>1</sup>Maya Astuti Dewi, "Konteks Global dan Nasional Gerakan Perempuan di Masa Orde Baru," *Disertasi Universitas Airlangga*(2006), 10.

<sup>2</sup>Walaupun pada tahun 1980-an Orde Baru telah melibatkan perempuan dalam Rencana Pembangunan Lima Tahunan (Repelita) yang dituangkan dalam GBHN, tetapi justru itu adalah beban ganda bagi perempuan (Mansour Fakih, *Analisis Gender dan Transformasi Sosial* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1996), 41-58.

<sup>3</sup>Neng Dara Afifah, *Potret Perempuan Muslim Progresif Indonesia* (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2017), 73.

4. Gerakan Wanita Indonesia (Gerwani) Gerwani yang merupakan organisasi perempuan yang konsisten melakukan kampanye terhadap persamaan hak dan kedudukan terhadap perempuan dalam berbagai bidang. Mereka juga aktif mengkampanyekan anti-poligami, anti-perkawinan dini, anti-perdagangan perempuan, dan anti-penjualan keperawanan. Selain itu, *land reform* juga diperjuangkan oleh Gerwani yang membuat mereka harus berhadap-hadapan dengan para petinggi dan tuan tanah.<sup>4</sup>

Pada masa Orde Lama, organisasi perempuan mengalami masa ambivalensi dan ketegangan yang disebabkan oleh gejolak politik pada masa itu. pada umumnya mereka lebih bergerak pada aktivitas-aktivitas pelayanan seperti pendidikan kesehatan dan tidak melakukan advokasi isu-isu strategis seperti sebelumnya. Bahkan, mereka tidak bersikap kritis termasuk kepada poligami Sukarno dan percintaannya kepada banyak perempuan.<sup>5</sup>

Memasuki rezim Orde Baru, negara membangun citra baru perempuan sebagaimana yang tertera dalam Panca Dharma Wanita. Pertama, wanita sebagai pendamping suami. Kedua, wanita sebagai ibu pendidik dan pembina generasi muda, Ketiga, wanita sebagai pengatur ekonomi rumah tangga. Keempat, wanita sebagai pencari nafkah tambahan. Kelima, wanita sebagai anggota masyarakat, terutama organisasi wanita, badan sosial, dan sebagainya yang menyumbangkan

---

<sup>4</sup>Hikmah Diniah, *Gerwani Bukan PKI: Sebuah Gerakan Feminis Terbesar di Indonesia* (Yogyakarta: Caraswati Books, 2007), 160-165.

<sup>5</sup>Stephen A. Douglas, "Women in Indonesian Politics: The Myth of Functional" (1980), 165. dalam Siti Ruhaini Dzuhayatin, *Rezim Gender Muhammadiyah: Kontestasi Gender, identitas, dan Eksistensi* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2015), 97.

tenaga kepada masyarakat.<sup>6</sup> Julia Suryakusuma menyebutkan bahwa konstruksi sosial kaum perempuan Indonesia yang dilakukan Orde Baru tersebut dengan istilah *ibuisme negara (state ibuisme)*<sup>7</sup> dan *housewifization*<sup>8</sup>. Ibuisme negara tersebut setidaknya dapat disaksikan dengan membentuk satu organisasi istri yakni Dharma Wanita<sup>9</sup> dan Pembina Kesejahteraan Keluarga (PKK).<sup>10</sup> Dharma

---

<sup>6</sup>Ruth Rahayu Indiyah, "Politik Gender Orde Baru: Tinjauan Organisasi Perempuan sejak 1980-an" *Prisma* (Mei 1996).

<sup>7</sup>Perempuan harus melayani suami, anak-anak dan keluarga, masyarakat dan negara.

<sup>8</sup>Perempuan harus memberikan tenaga mereka secara cuma-cuma tanpa mengharapkan imbalan. Tujuan penerapan nilai-nilai Panca Dharma Wanita, ideologi *state ibuisme*, atau *housewifization* penerapan nilai-nilai ini tidak lain merupakan justifikasi pragmatisme atau oportunisme pemerintah, akan tetapi berimplikasi luar biasa pada peminggiran gerakan perempuan yang memperjuangkan kehidupan perempuan yang lebih baik. Terkadang juga disebut dengan ideologi gender Orde Baru.

<sup>9</sup>Dharma Wanita didirikan pada tanggal 5 Agustus 1974 dengan sentral struktur organisasi Dharma Wanita dibagi dalam tingkat: 1) tingkat pusat. Yang dipimpin oleh Presidium Dharma Wanita dan pengurus harian Dharma Wanita Pusat dengan pembina utama Preside Soeharto, Penasehat Utama Ibu Tien Soeharto. 2) Tingkat Daerah, yang dipimpin oleh pengurus Dharma Wanita yang wilayah kerjanya meliputi wilayah propinsi 3) Tingkat cabang, yang dipimpin oleh pengurus cabang Dharma Wanita, yang wilayah kerjanya meliputi wilayah kabupaten/Kotamadya (Kowani, *Sejarah Setengah Abad Kesatuan Pergerakan Wanita Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka, 1986), 296.

<sup>10</sup>Pembinaan Kesejahteraan Keluarga awalnya dibentuk dalam seminar tentang ilmu kesejahteraan keluarga di Bogor, Jawa Barat Pada 1957. Seminar ini diselenggarakan bagian pendidikan dan Lembaga Gizi Masyarakat kementerian kesehatan. Antara 1960 dan 1962, suatu panitia antar departemen yang terdiri atas kementerian pendidikan dan kebudayaan (P&K), kementerian Perburuhan, Kementerian Agama, Kementerian Pertanian, Kementerian dalam Negeri dan sejumlah tokoh wanita yang menyusun daftar topik pendidikan yang mereka anggap tepat pada masyarakat yang sedang membangun. Pada perkembangan selain memberikan pelajaran PKK di sekolah sebagai bagian dari sistem pendidikan resmi. Kementerian pendidikan dan kebudayaan merekomendasikan agar PKK dijadikan pelajaran dalam pendidikan non formal.

Pada pertengahan dasawarsa 1960-an gubernur Jawa Tengah menginstruksikan Pelaksanaan PKK sebagai bagian dari upaya pembangunan untuk disosialisasikan dan didirikan Pusat Latihan Pembinaan kesejahteraan Keluarga (PLPKK) di semua kabupaten. Pada akhir 1971 pada rapat gubernur seluruh Indonesia, menteri dalam negeri mengusulkan PKK menjadi program utama lembaga Sosial Desa (LSD). LSD berubah menjadi LKMD (lembaga Ketahanan Masyarakat Desa) dan bertanggungjawab dialihkan dari Departemen Sosial ke Provinsi dibawah Departemen Dalam Negeri agar mudah kontrol negara (Brosur Kementerian dalam negeri)

Pada tahun 1980-an, PKK mulai mendapatkan bantuan dari instruksi presiden 100.000/desa/tahun (nilai tukar dola AS sebelum 1982 US\$1= 700: sebelum 1986 US\$1 1000 dan setelah 1986 US\$1:1700). Kedudukann PKK secara fungsional diduduki oleh istri kepala desa sekaligus menjabat sebagai ketua II LKMD. Isi PKK juga mengalami perubahan dengan programnya sebelumnya program PKK terdiri dari 10 segi dengan segi pertamanya "hubungan dalam keluarga" setelah 1982. Segi-segi ini menjadi program dengan P4 (Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila) sebagai program pertama dan utamanya. Perubahan ini sangat berarti dengan menjadi program P4 sebagai program pertama, negara membubuhkan capnya secara telak pada PKK, yang juga bermakna ialah perubahan sebutan "gerakan" PKK dari Program menjadi

Wanita didirikan untuk mengontrol aktivitas istri pegawai negeri serta mendukung dan mensukseskan kerja-kerja suaminya, sedangkan PKK sebagai ruang untuk menyalurkan program-program pemerintah bagi kaum perempuan di pedesaan. Peran PKK menjadi penting karena menjadi mesin negara untuk mengarahkan masyarakat dalam rangka mendukung dan mensukseskan pemerintahan Orde Baru.<sup>11</sup>

Selain Dharma Wanita dan PKK yang berbasis istri pegawai negeri atau pejabat, korporatisasi negara<sup>12</sup> juga terjadi dalam organisasi gerakan wanita Kowani (Konggres Wanita Indonesia) yang sebelumnya berdiri secara independen.<sup>13</sup> Kowani ditunjuk oleh pemerintah Orde Baru untuk menjadi organisasi payung bagi kelompok wanita, baik dari organisasi profesional, sosial, keagamaan, dan organisasi-organisasi fungsional.<sup>14</sup>

Mulai tahun 1980-an, di tengah praktik pemerintahan politik Orde Baru yang memproduksi negara yang kuat dan relatif otonom, pergerakan perempuan di Indonesia mulai tumbuh kembali. Hal ini dilatarbelakangi terutama wacana

---

“Pembinaan” yang menyiratkan pengarahan dan kontrol yang hendak diberikan kepada Orde Baru kepada PKK (Julia Surya Kusuma, *Ibuisme Negara* (Jakarta: Komunitas Bambu, 2011), 28.

<sup>11</sup>Julia Surya Kusuma, *Ibuisme Negara*, 11.

<sup>12</sup>Korporatisasi juga terjadi di banyak sektor kehidupan kelompok kepentingan lainnya agar tidak terlalu independen atau populer (seperti masuk ke dalam Kadin (Kamar Dagang dan Industri), PWI (Persatuan Wartawan Indonesia), HKTI (Himpunan Kerukunan Tani Indonesia), SPSI (Serikat Pekerja Seluruh Indonesia), PGRI (Persatuan Guru Republik Indonesia) dan lain sebagainya). Politik kooptasi dijalankan lewat upaya penundukan tokoh-tokoh dari berbagai organisasi politik dan sosial agar tidak menjadi oposan terhadap penguasa (seperti kooptasi intelektual Islam dan para pemimpin Islam lewat pembentukan ICMI sehingga potensi oposisi dari kelompok Islam dapat dicegah). (Priyo Budi Santoso, *Birokrasi Pemerintah Orde Baru* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1997), 106-108.

<sup>13</sup>Organisasi ini didirikan pada 1928 dizaman pergerakan nasional sebagai federasi organisasi-organisasi wanita terpelajar, dan pada masa Orde Baru, Kowani menjadi sarana tunggal perempuan Indonesia dengan memayungi 55 organisasi anggotanya dan terkait erat dengan Golkar. Dengan begitu Kowani kehilangan otonominya sebagai organisasi gerakan perempuan yang sebelumnya independen. (Julia Suryakusuma, *Ibuisme Negara*, 16-17)

<sup>14</sup>*Ibid.*, 19.

global tentang marginalisasi perempuan dalam pembangunan. Dalam konteks Yogyakarta, beberapa organisasi perempuan tersebut tersebut adalah ‘Aisyiah, Muslimat, Yayasan Annisa Swasti (Yasanti),<sup>15</sup> dan Rifka Annisa.

Sebagaimana argumen utama dalam tesis ini, Aisyiah dan Muslimat, keduanya merupakan organisasi perempuan yang lahir dari dua organisasi keagamaan Islam terbesar di Indonesia: Muhammadiyah dan NU, melakukan perjuangan dan pembelaan kepada kaum perempuan dengan aktif menyuarakan apa yang menjadi kebutuhan perempuan terutama pendidikan dan kesehatan.<sup>16</sup> Adapun Yasanti merupakan organisasi perempuan yang aktif melakukan penguatan kemandirian perempuan baik secara ekonomi maupun politik, sedangkan Rifka Annisa (1993)<sup>17</sup> lebih mengarah kepada isu-isu perempuan seperti KDRT dan pendampingan memberikan pendidikan mengenai hak-hak perempuan.

Dari uraian di atas, penelitian tesis ini dilakukan berdasarkan dua alasan utama: Pertama, dinamika sejarah pergerakan perempuan pada masa Orde Baru di mana negara melakukan kebijakan untuk membatasi gerakan perempuan. Kedua, bangkitnya kembali organisasi-organisasi perempuan pada tahun 1980-an yang memberikan respons terhadap sejumlah isu nasional sebagaimana yang telah diuraikan pada awal tulisan ini.

---

<sup>15</sup> Akta Notaris berdirinya Yayasan Annisa Swasti.

<sup>16</sup> *1 Abad Muhammadiyah* (Yogyakarta: Majelis Pustaka Informasi dan Pimpinan pusat Muhammadiyah, 2014), 90.

<sup>17</sup> Dudung Juliantara, *Pergulatan Buruh Perempuan – Refleksi Perjalanan Yasanti* (Yogyakarta: Yasanti & LP3ES USAID, 1998), 60.



## **B. Rumusan Masalah**

Penelitian ini secara spesifik bertujuan untuk menggali pengalaman organisasi perempuan di Yogyakarta dalam merespon isu-isu nasional pada paruh pertengahan Orde Baru. Organisasi-organisasi tersebut yakni dua dari organisasi masyarakat Islam Aisyiyah, Muslimat dan dua dari organisasi Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Yasanti, dan Rifka Annisa. Keempat organisasi itu dipilih sebagai objek penelitian karena merupakan yang paling aktif dan masih eksis sampai sekarang. Adapun secara temporal, penelitian ini dibatasi tahun 1980 – 1998 karena memasuki dekade Indonesia menyaksikan bangkitnya gerakan perempuan yang dipengaruhi konteks global.

Oleh karena itu dari batasan tersebut, dapat dirumuskan tiga pokok permasalahan dalam penelitian ini:

1. Bagaimana wacana gender pada masa Orde Baru?
2. Bagaimana dinamika gerakan perempuan di Yogyakarta pada masa Orde Baru?
3. Bagaimana respons gerakan perempuan di Yogyakarta terhadap isu-isu nasional meliputi pengendalian penduduk, Peristiwa Kedung Ombo, Marsinah, dan Kekerasan Mei 1998?

## **C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah di atas, penelitian ini dilakukan dengan tujuan sebagai berikut:

1. Menjelaskan secara umum pertumbuhan dan perkembangan gerakan perempuan di Yogyakarta dalam rentang waktu tahun 1980-1997
2. Bagaimana hubungan serta sikap gerakan-gerakan perempuan di Yogyakarta dengan pemerintah pusat
3. Mengetahui aktifitas sekaligus kontribusi gerakan-gerakan perempuan pada masyarakat Yogyakarta saat itu.

#### **D. Tinjauan Pustaka**

Penelitian terhadap gerakan perempuan telah dilakukan oleh banyak peneliti sebelumnya. Hal ini disebabkan aktivitas gerakan perempuan merupakan fenomena yang mudah dan kerap sekali kita jumpai dalam realitas kehidupan sehari-hari. Di antara penelitian tersebut adalah sebagai berikut:

Cora Vreede De Struess dalam bukunya *Sejarah Perempuan Indonesia Gerakan dan Pencapaian* Pada tahun 1960-an, buku ini merupakan buku sarjana luar negeri yang pertama kali menceritakan tentang sejarah pergerakan perempuan di Indonesia. Studi yang dilakukan De Struess ini dapat dikatakan sebagai perintis studi terkait gerakan perempuan modern abad ke-20 yang banyak dipengaruhi oleh suasana pergerakan modern. Dalam karya tersebut, De Struess memberikan penjelasan yang menarik tentang evolusi kesadaran perempuan di Indonesia dari pra-kolonial sampai era kemerdekaan Indonesia.

Karya lainnya dilakukan oleh Sukanti Suryochondro dalam bukunya *Potret Gerakan Wanita Indonesia, (1984)* yang diterbitkan oleh Depdikbud dan menjadi

inventarisasi dan dokumentasi sejarah nasional. Buku ini merupakan penelitian terkait organisasi-organisasi sebagai gerakan perempuan di Indonesia sejak mulai dari masa penjajahan Hindia Belanda, Jepang, masa kemerdekaan, masa Orde Lama, dan separuh perjalanan Orde Baru. Tidak beda jauh dengan De Struess asas dari penelitiannya adalah nilai-nilai apa yang menjadi dasar perjuangan perempuan serta struktur dan sifat organisasi perempuan dari masa ke masa.

Karya yang tidak kalah pentingnya dilakukan oleh Julia Suryakusuma dalam tesisnya yang berjudul *Ibuisme State (2000)* yang kemudian diterjemahkan dan diterbitkan dan berjudul *Ibuisme Negara*. Dalam buku tersebut Julia mengulas terkait tentang konsep ibuisme negara yang di bentuk oleh Orde Baru dan di Propagandakan dalam organisasi bentuknya PKK dan Dharma Wanita yang memperlihatkan peribuan dalam organisasi perempuan tersebut. Selain itu PKK dan Dharma Wanita menjadi kepanjangan tangan oleh Orde Baru dengan memerintah secara otoriter dan menjamin kepatuhan rakyat secara menyeluruh, termasuk didalamnya adalah organisasi-organisasi perempuan.

Penelitian Saskia Elenora Weiringa (2010) berjudul *Penghancuran Gerakan Perempuan di Indonesia: Politik Seksual di Indonesia Pasca Kejatuhan PKI*, terj. Harsutejo lebih jelas buku ini mengulas sejarah penghancuran Gerakan Wanita Indonesia (Gerwani). Dalam penelitiannya ini Werienga berhasil mengisi kekosongan narasi sejarah dari perspektif gender yang selama ini dikuasai oleh sejarah versi laki-laki secara detil dan mendalam. Selain itu, hal yang juga penting adalah bagaimana wacana tentang posisi gerakan perempuan dalam konteks perjuangan kelas dimunculkan dalam buku ini. Gerwani pada masa revolusi

kemerdekaan merupakan organisasi perempuan yang aktif memperjuangkan hak-hak perempuan salah satunya adalah perempuan ikut ambil bagian dalam politik nasional dan merevisi undang-undang perkawinan yang mensahkan poligami. Akan tetapi sebaliknya, pada masa Orde Baru, Gerwani dipropagandakan sebagai organisasi kiri yang dianggap ikut terlibat dalam kasus G 30 S PKI dengan membunuh para jendral Angkatan Darat sehingga diperbolehkan untuk dihancurkan.

Tesis Siti Syamsiyatun dengan judul *Muslim Women Politics In Advancing Their Gender Interests: A Case-Study Of Nasyyiatul 'Aisyah Indonesian New Order Era*. Karya Siti Syamsiyatun ini menjelaskan mengenai strategi perjuangan organisasi Nasyyiatul 'Aisyah bagi kemajuan di tanah air agar tidak terdiskriminasi dalam pembangunan yang dicanangkan oleh pemerintah Orde Baru.

Kajian para pakar di atas tampaknya masih sangat terbatas dan pada variabel tertentu saja, belum ada secara penelitian yang secara spesifik mengulas gerakan perempuan dalam merespon kasus-kasus nasional khususnya di Yogyakarta. Perlu peneliti tekankan di sini bahwa beberapa studi tentang gerakan perempuan sebagaimana di atas, tetap menjadi sumber referensi dalam penelitian ini. Sehingga kajian dan penelitian para pakar di atas berarti besar sumbangannya bagi peneliti untuk mengelaborasi lebih intens terkait gerakan perempuan masa Orde Baru.

## E. Kerangka Teoritis

Penelitian ini memposisikan gerakan perempuan sebagai gerakan sosial yang memperjuangkan kebutuhannya dan eksistensinya agar dapat bertahan dan mempunyai kondisi yang lebih baik dalam berbagai aspek kehidupannya terutama sosial, budaya, politik dan hukum. Dengan demikian, gerakan perempuan ini dilihat sebagai gejala sosial yang akan dikaji sebagai gerakan yang sudah ada sejak dulu, sejak awal kemunculan dan perjalanan sejarahnya secara terus-menerus memperjuangkan hak kaum perempuan.

Dari sejarahnya, gerakan perempuan muncul dari manifestasi dalam rasa ketidakpuasan dan keresahan (*granvienciest, discontent*) dari pihak tertekan yang mendorong aksi-aksi kolektif yang lazim disebut dengan gerakan sosial atau yang sering kita dengar dengan *social movement*. Jadi gerakan sosial merupakan aksi kolektif yang berorientasi konfliktual secara manifes terhadap lawan sosial dan politik tertentu yang dilakukan dalam konteks jejaring lintas kelembagaan yang erat oleh aktor-aktor yang diikat oleh rasa solidaritas dan identitas kolektif melebihi bentuk-bentuk ikatan dan koalisi kampanye bersama.<sup>18</sup>

Dalam proposisi tersebut gerakan sosial digambarkan sebagai sebuah proses tindakan kolektif yang didorong oleh rasa ketidakpuasan yang menyulut aksi konfliktual dan adanya kolektivitas yang diikat oleh kesadaran bersama dalam satu emosi yang menimbulkan solidaritas dan identitas bersama serta adanya tindakan atau aksi bersama untuk mencapai tujuan. Fainstein menjelaskan

---

<sup>18</sup>Darmawan Wibisono, *Gerakan Sosial: Wahana Civil Society bagi Demokratisasi* (Jakarta: LP3ES, 2006), vx.

pengertian gerakan sosial sebagai “*an emergent group which process to innovate and depend for it succes upon of conversion of social collectivity into an action group*”.<sup>19</sup> Bahwa gerakan sosial adalah sebuah kelompok bentukan yang bergerak untuk mewujudkan hal baru, menggantungkan kesuksesannya terhadap perubahan-perubahan haluan dari kolektivitas sosial menjadi aksi kelompok.

Defenisi tersebut memberi pemahaman baru tentang gerakan sosial yaitu sebagai sebuah “kelompok jadian atau bentukan”, artinya kelompok tersebut muncul didahului oleh faktor-faktor tertentu yang memicu terbentuknya kelompok gerakan. Disamping itu tampak juga bahwa gerakan sosial itu terbentuk sebagai sebuah kolektivitas yang sudah terorganisir untuk mewujudkan perubahan sosial. pengertian ini sejalan dengan defenisi yang dibuat oleh Direnzo yang mengartikan gerakan sosial sebagai sebuah perilaku kelompok masyarakat untuk mengoreksi berbagai kondisi yang problematik agar terwujud kehidupan sosial yang lebih baik.<sup>20</sup> Definisi ini lebih menekankan tujuan dari gerakan sosial itu sendiri yakni proses sosial dasar yang menghasilkan perubahan sosial yang memanifestasikan kemanusiaan dan keharmonisan dalam kehidupan sosial.

Defenisi lebih operasional tentang gerakan sosial ditegaskan oleh Balridge sebagaimana dikutip oleh Soenyono bahwa gerakan sosial adalah suatu perilaku kolektif yang terdiri atas sekelompok orang yang memiliki dedikasi, terorganisasi, *sustainable* atau berkelanjutan<sup>21</sup> untuk mempromosikan atau menghalangi

---

<sup>19</sup>Norman I Fainstein and Susan Fainstain, *Urban Political Movement*, (New Jersey: Prentice-Hall 1974), 238.

<sup>20</sup>G. Direnzo, *Human Sosial Behaviour: Concept and Principle of Sociology* (USA: Holt Rinehart and Winston limited, 1990), 23.

<sup>21</sup>Charless Tilly, *From Mobilitation to Revolution* (Addision Wesley, 1978), 10-11.

terjadinya suatu perubahan. Organisasi yang dimaksud tentunya mempunyai struktur dan tujuan yang jelas berorientasi pada perubahan, dan gerakan tersebut dilakukan secara sadar dan jelas dengan mempromosikan kebijakan-kebijakan yang mereka inginkan yang pada umumnya dilakukan melalui aktivitas-aktivitas politik dan pendidikan.<sup>22</sup> Terlepas dari berbagai definisi yang berbeda redaksi dan ekstensinya namun memberikan pengertian substantif yang sama yaitu inti gerakan sosial adalah sebuah aksi kolektif sebagai kelompok bentukan yang dimotivasi oleh emosi keresahan bersama untuk mewujudkan kondisi sosial yang lebih baik. Pada intinya, konsep *social movement* ini nantinya merupakan kendaraan utama bagi gerakan perempuan untuk melakukan aksi kolektifnya.

Penelitian ini menggunakan dua pendekatan pendekatan. Pendekatan sejarah dan politik, pendekatan sejarah peneliti gunakan untuk melihat sejarah perempuan (*gynosentris*) yang tersembunyi. Adapun, pendekatan politik dipilih menjadi sebuah pendekatan karena dianggap dapat mengulas secara mendetil terkait kebijakan-kebijakan negara.

Untuk menganalisis ketimpangan dan ketidakadilan pada beberapa isu nasional yang nanti akan dibahas peneliti menggunakan teori *women's history* Joan Wallacht Scott. Seperti yang dilakukan oleh beberapa peneliti sejarah di Amerika dan Eropa yang menuliskan konstruksi teori penelitian sejarah yang berpusat pada perempuan (*gynosentris*). Scott menawarkan “gender” sebagai kategori analitik penelitian sejarah supaya mampu mengungkap tabir ketidakadilan dalam berbagai relasi perempuan dengan modal, militer, kehancuran

---

<sup>22</sup> Soenyono, *Teori-Teori Gerakan Sosial* (Surabaya: Yayasan Kampusiana, 2005), 4.

ekologi, dan sebagainya. Scott dan sejawatnya lebih memilih istilah *feminist history* sebagai sebuah metode dalam menuliskan sejarah *gynocentris*, ketimbang istilah *women's historian*. Hal tersebut dilakukannya untuk menggali akar ketidakadilan yang tersembunyi dalam sejarah sosial yang lebih komprehensif, detail dan majemuk.<sup>23</sup>

## F. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode sejarah atau *historical method*, yaitu seperangkat aturan atau prinsip yang sistematis untuk mengumpulkan sumber-sumber sejarah secara efektif, menilainya secara kritis, dan mengajukan sintesa dari hasil-hasil yang dicapai dalam bentuk tertulis.<sup>24</sup> menurut Kuntowijoyo untuk mendapatkan penelitian yang sempurna seorang peneliti sejarah harus melalui lima tahap penelitian, yaitu: pemilihan topik, heuristik, verifikasi interpretasi.<sup>25</sup>

### 1. Pemilihan topik

Topik dalam penelitian ini adalah Respon Gerakan Perempuan di Yogyakarta Terhadap Isu-Isu Nasional (1980-1998)

### 2. Heuristik

Tahap awal dalam penelitian sejarah adalah pengumpulan sumber. Berdasarkan dimensi waktu, maka sejarah terbagi menjadi sejarah kuno, sejarah modern dan sejarah kontemporer. Penelitian ini berdasarkan dimensi waktu termasuk kategori sejarah kontemporer. Penulisan sejarah

<sup>23</sup>Joan W. Scott "Gender: A Useful Category of Historical Analysis. The American Historical Review" Vol. 91, No. 5. (Dec., 1986), 1053-10755.

<sup>24</sup>Gilbert J. Garraghan, *Guide to Historical Method* (London: Macmillan Education LTD, 1957), 33. dalam Dudung Abdurrahman, *Metodologi Penelitian Sejarah Islam* (Yogyakarta: Ombak, 2011), 104.

<sup>25</sup>Kuntowijoyo, *Pengantar Ilmu Sejarah* (Yogyakarta: Benteng Budaya. 1995), 89.



sangat tergantung pada kesediaan data yang dibutuhkan. Adapun sumber yang digunakan adalah sumber-sumber tertulis dan lisan mengingat peristiwa yang diteliti berdasarkan dimensi waktunya termasuk kategori sejarah kontemporer maka ada dua sumber sumber tertulis dan sumber lisan.<sup>26</sup> Sumber tertulis peneliti peroleh dari dari berbagai *leaflet*, laporan tahunan Yasanti Rifka Annisa dan Aisiyah, Akta Berdiri organisasi Rifka Annisa dan Yasanti, Buletin-buletin yang diterbitkan oleh Aisiyah, Yasanti, dan Rifka, buku, artikel, makalah, jurnal, koran dan semua dokumen yang terkait dengan kajian yang diteliti. Sumber tersebut peneliti dapatkan dari Kantor Arsip Daerah Yogyakarta, Perpustakaan UGM, Perpustakaan Pusat UIN Sunan Kalijaga, Perpustakaan Pasca Sarjana UIN, dan Perpustakaan LKIS, Perpustakaan Kota Yogyakarta, Perpustakaan Yayasan Annisa Swasti, dan Perpustakaan Rifka Annisa dan Perpustakaan Daerah Grahatama. Peneliti juga mendapatkan sumber berupa buku yang merupakan koleksi pribadi beberapa sahabat yang terkait dengan penelitian ini.

Adapun untuk sumber lisan, peneliti peroleh dari *key-person* organisasi-organisasi yang aktif dalam gerakan perempuan masa Orde Baru seperti Aktivis Yayasan Annisa Swasti, Aktivis NU Yogyakarta, Aktivis Aisiyah dan aktivis pergerakan perempuan lainnya secara personal yang terlibat aktif pada masa Orde Baru seperti AP Muniarti, Asih Nur Candra

---

<sup>26</sup>Nugroho Notosusanto, *Masalah Penelitian Sejarah Kontemporer*, (Jakarta: Inti Idayu Press, 1984), 6.

### 3. Kritik Sumber (Verifikasi)

Setelah semua data sejarah terkumpul, langkah selanjutnya adalah melakukan kritik sumber yang meliputi kritik ekstern dan intern. Kritik ekstern bertujuan untuk mencari keotentikan sumber dengan menguji bagian-bagian fisik meliputi beberapa aspek, seperti kertas, gaya tulisan, bahasa, kalimat, ungkapan, dan semua aspek luarnya. Adapun untuk menguji kesahihan sumber, peneliti melakukan kritik intern dengan cara menelaah isi tulisan dan membandingkan dengan tulisan lainnya agar mendapatkan data yang kredibel dan akurat.

### 4. Interpretasi

Setelah melakukan kritik sumber, baik ekstern maupun intern, langkah selanjutnya yang peneliti lakukan adalah interpretasi atau penafsiran dan melakukan berbagai analisa. Dalam hal ini peneliti melakukan penafsiran dengan cara melakukan sintesis atas fakta-fakta yang diperoleh melalui eksplanasi sejarah.<sup>27</sup> Mekanisme interpretasi dilakukan terhadap data dalam berbagai tulisan yang diperoleh berdasarkan kerangkateori penelitian ini.

### 5. Historiografi

Tahap akhir dari proses penelitian ini adalah penulisan sejarah atau historiografi. Historiografi disini merupakan cara penulisan, pemaparan,

---

<sup>27</sup>Ibrahim Alfian, *Sejarah dan Permasalahan Masa* (Yogyakarta: UGM, 1985), hlm. 7 dalam Dudung Abdurrahman, *Metodologi Penelitian Sejarah*, 168.

atau pelaporan hasil penelitian sejarah atau pelaporan hasil penelitian sejarah yang sudah dilakukan.<sup>28</sup>

## **G. Sistematika Pembahasan**

Untuk memberikan gambaran yang utuh pada penelitian ini, berikut akan dijelaskan sistematika pembahasan, yang secara garis besar akan dijelaskan pada lima bab yang semua saling berkaitan:

Bab I merupakan pendahuluan yang menggambarkan kerangka penelitian ini yang memuat rancangan organisasi ini dilakukan dengan meliputi latar belakang, rumusan masalah, alasan pemilihan topik, tujuan penelitian, manfaat penelitian, tinjauan pustaka, kerangka berpikir, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

Bab II menjelaskan kondisi sosial politik pada masa Orde Baru baik sebelum tahun 1980-an atau sesudahnya. Dengan mengetahui kondisi Orde Baru, diharapkan dapat memahami peta situasi yang nantinya mempunyai hubungan dengan penjelasan berikutnya.

BAB III menjelaskan organisasi-organisasi perempuan di Yogyakarta seperti Yayasan Annisa Swasti, Rifka Annisa, dan organisasi perempuan keagamaan seperti 'Aisyah, Muslimat NU

---

<sup>28</sup>Dudung Abdurrahman, *Metodologi Penelitian Sejarah*, 165-166.

Bab IV menjelaskan respon organisasi-organisasi perempuan terkait isu-isu nasional meliputi Keluarga Berencana, Marsinah, Kedung Ombo, dan kekerasan Mei 1997

Bab V merupakan bab terakhir dari penelitian ini yang berisi kesimpulan dan saran untuk penelitian selanjutnya.



## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Tesis ini membahas organisasi perempuan di Yogyakarta. Dari seluruh pembahasan yang sudah dilakukan, tesis ini menghasilkan beberapa kesimpulan sebagai berikut:

Pertama, Pemerintahan Orde Baru mengkonstruksikan sebuah ideologi gender yang mendasarkan diri pada “ibusime”, sebuah paham yang melihat kegiatan ekonomi perempuan sebagai bagian dari peranannya sebagai ibu dan partisipasi perempuan dalam politik sebagai tak layak. Politik gender ini termanifestasikan dalam dokumen-dokumen negara, seperti GBHN, UU Perkawinan No. 1/1974 dan Panca Dharma Wanita.

Dalam usaha untuk memperkuat politik gender tersebut, pemerintah Orde Baru merevitalisasi dan mengelompokkan organisasi-organisasi perempuan yang berafiliasi dengan departemen pemerintah pada tahun 1974. Organisasi-organisasi ini (Dharma Wanita, Dharma Pertiwi dan PKK) membantu pemerintah menyebarluaskan ideologi gender Orde Baru dan menstabilkan pemerintahan tersebut.

Ideologi gender ini dilakukan dengan dua cara, pertama, reproduksi subordinasi perempuan dan superioritas laki-laki melalui berbagai kebijakan publik dan pembentukan organisasi istri. Kedua, kooptasi dan depolitisasi

organisasi kemasyarakatan. Sebagai ilustrasinya adalah dikooptasinya organisasi-organisasi perempuan untuk mendukung Golkar di masa Orde Baru, dan dikembangkan sistem “Ibuisme” oleh Negara dalam memperlakukan perempuan Indonesia. Dalam system tersebut, perempuan diperlakukan seperti Ibu yang berperan sekunder

Kedua, dampak dari akibat pendepolitisasian dan kooptasi perempuan dalam ideologi gender pemerintahan Soeharto. Gerakan perempuan mulai muncul dan aktif kembali pada paruh kedua dekade 1980-an salah satunya di Jogjakarta muncul berbagai organisasi-organisasi yang prihatin dan peduli terhadap kondisi perempuan. Diantara organisasi-organisasi tersebut adalah ‘Aisyiah dan Muslimat NU mewakili gerakan perempuan berbasis agama yang berada di bawah payung dua organisasi keagamaan terbesar di Indonesia yaitu Muhammadiyah dan NU, sedangkan dua lainnya mewakili gerakan perempuan berbasis LSM yakni Yayasan Annisa Swasti dan RifkaAnnisa.

Ketiga, Seiring dengan kesadaran sensitifitas gender kesamaan atas hak antara laki-laki perempuan terhadap organisasi-organisasi tersebut merespon isu nasional berkenaan HAM dan persoalan perempuan seperti isu Pengendalian Penduduk, Kedung Ombo, Marsinah, dan kekerasan Mei 1998. Dalam merespon isu tersebut penulis klasifikasikan pada respon akomodatif dan konfrontatif. *Pertama*, Untuk organisasi perempuan yang berbasis Ormas. Aisyiah merespon isu dan program pemerintah Pengendalian Penduduk secara akomodatif dengan mengembangkan program “Keluarga Sakinah” yang merupakan *counter culture* dari Aisyiah terhadap kultur keluarga yang di bentuk negara. selanjutnya di susul

dan di kembangkan oleh Muslimat NU dengan program “Keluarga Masalah.”

*Kedua*, Untuk organisasi LSM merespon secara Konfrontatif. Yasanti merespon kasus Kedung Ombo aktif bekerjasama berbagai pihak ikut mendampingi korban karena merespon langsung kasus benturan dengan TNI AD, sedang dalam respon kasus Marsinah Yasanti beraliansi dengan forum diskusi perempuan di Yogyakarta dengan membentuk GAKTPI dan menandatangani traktat tuntutan di Sidoarjo dalam penyelesaian dan penuntasan penyelesaian kasus Marsinah. Adapun Rifka Annisa merespon kasus perkosaan Mei 1998 tidak beda jauh dengan Yasanti karna kasus berbenturan langsung dengan TNI AD, Rifka yang memilih merespon kasus di Yogyakarta bersama organisasi dan masyarakat lain menuntut Sultan Hamengkubuwono untuk bersikap pada pemerintah pusat dalam penyelesaian kasus pemerkosaan tersebut. Adapun pada akhirnya puncak dari pelanggaran HAM yang dilakukan oleh pemerintahan Soeharto tersebut adalah berdirinya Komnas Perempuan.

## **B. Saran**

Dari seluruh rangkaian hasil penelitian ini, saran untuk penelitian berikutnya adalah sebagai berikut: Kajian tesis ini masih memberikan ruang kepada peneliti selanjutnya untuk mengetahui respon organisasi perempuan terhadap isu kekerasan 98, peristiwa Kedung Ombo, atau Marsinah secara lebih spesifik dan komprehensif terutama ‘Aisyah dan Muslimat dalam merespon kasus-kasus tersebut.

## DAFTAR PUSTAKA

### 1. DAFTAR BUKU

- 1 Abad Muhammadiyah*. Yogyakarta: Majelis Pustaka Informasi dan Pimpinan pusat Muhammadiyah, 2014.
- A. E. Priyono, Stanley Adi Prasetyo, Olle Tornqist. *Gerakan Pro Demokrasi di Indonesia Pasca Soeharto*. Jakarta: DEMOS, 2003.
- Abdulah, Irwan. *Sangkan Paran Gender*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2006.
- Achmad, Sjamsiah. *Wanita Dalam Pembangunan Bangsa*. PT Gramedia Pustaka Utama: Jakarta, 1994.
- Alfian, Ibrahim. *Sejarah dan Permasalahan Masa*. Yogyakarta: UGM, 1985.
- Al-Jauhari, Abas. *Refleksi Tentang Hubungan NGO Dengan Pemerintah*. Peneliti Pusat Studi Islam dan Kenegaraan (PSIK) Universitas Paramadina.
- Annisa, Rifka. *Menuju Gerakan Sosial Untuk Penghapusan Kekerasan Terhadap Perempuan: Refleksi 10 Tahun Perjalanan Rifka Annisa*” dalam Yogyakarta: Rifka Annisa, 2003.
- Asriani, Dwi D. *“Kesehatan Reproduksi Dalam Bingkai Tradisi Jawa*. Yogyakarta: 2010.
- Blackburn, Susan. *Perempuan dan Negara dalam Era Indonesia Modern*. Jakarta: Kalyanamitra, 2009.
- Burhanudin, Jajat. *Ulama Perempuan Indonesia*. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama dan PPIM IAIN Jakarta, 2002.
- Dara, Neng Afifah. *Potret Perempuan Muslim Progresif Indonesia*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2017.
- Diniah, Hikamah. *Gerwani Bukan PKI: Penghancuran Gerakan Feminis Terbesar di Indonesia*. Yogyakarta: Caraswati Books, 2007.
- Direnzo. *Human Sosial Behaviour: Concept and Principle of Sociology*. USA: Holt Rinehart and Winston limited, 1990.
- Dzuhayatin, Siti Ruhaini. *Rezim Gender Muhammadiyah: Kontestasi Gender, Identitas, dan Eksistensi*. Yogyakarta, Pustaka Pelajar, 2015.
- Fakih, Mansour. *Masyarakat Sipil untuk Perubahan Sosial: Pergolakan Ideologi LSM Indonesia*. Pustaka Pelajar, Yogyakarta: 1996.
- Fakih, Mansour. *Analisis Gender dan Transformasi Sosial*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1996.



- Fealy, Greg. *Ijtihad Politik Ulama Sejarah NU 1952-1967*. Yogyakarta: Lkis, 2003.
- Garraghan, Gilbert J. *Guide to Historical Method*. London: Macmillan Education LTD, 1957.
- Hadiz Liza, Eddyono Sri Wiyanti. *Pembakuan Peran Gender dalam Kebijakan-Kebijakan di Indonesia*. Jakarta: LBH APIK, 2001
- Hak Azazi Perempuan, *Instrumen Hukum Untuk Mewujudkan Keadilan Gender (Convention Watch, Pusat Kajian Wanita Dan Gender*. Jakarta: Universitas Indonesia Dan Yayasan Obor Indonesia 2004.
- Hanan, Diayadi. *Gerakan Pelajar Islam di Bawah Bayang-Bayang Negara*. Yogyakarta, UII Press, 2006.
- Indiyah, Ruth Rahayu. *Politik Gender Orde Baru: Tinjauan Organisasi Perempuan sejak 1980-an*, Mei 1996.
- Ismail, Faisal. *Pijar-Pijar Islam: Pergumulan Kultur dan Struktur*. Yogyakarta: LESFI, 2002.
- Juliantara, Dudung. *Pergulatan Buruh Perempuan – Refleksi Perjalanan Yasanti*. Yogyakarta: Yasanti & LP3ES USAID, 1998.
- Kowani. *Sejarah Setengah Abad Kesatuan Pergerakan Wanita Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka, 1986.
- Kuntowijoyo. *Pengantar Ilmu Sejarah*. Yogyakarta: Bentang Budaya. 1995.
- Manan, Abdul. *Demi Keadilan: Catatan 15 Tahun Elsam Memperjuangkan Ham*. Jakarta: Elsam 2008.
- Marching, Soe Tjen. *Kisah di Balik Pintu*. Yogyakarta: Ombak, 2011.
- Mardjono, Hartono. *Politik Indonesia (1996-2003)*. Jakarta: Gema Insani Press, 1997.
- Mulkhan, Abdul Munir. *Warisan Intelektual KH. Ahmad Dahlan dan Amal Usaha Muhammadiyah*. Yogyakarta : PT. Percetakan Persatuan, 1990.
- Natsir, Lies Marcoes dkk. *Peta Gerakan Perempuan Islam Pasca Order Baru*. Cirebon: Institut Studi Islam Fahmina, 2003.
- Neilsen, M. Joyce. *Sex and Gender in Society: Perspectives and Stratification*. Illionis: Prospet Hight, 1990.
- Nieuwenhuis, Madelon Djajadiningrat. *“Ibuisism and priyayization: Path to Power” in Indonesian Women in Focus: Past and Present Notions*, edited by E. Locher-Scholten and A. Niehof .Dordrecht-Holland: Foris Publication, 1987.

- Norman I Fainstein, Susan Fainstain. *Urban Political Movement*. New Jersey: Prentice-Hall 1974.
- Notopuro, Hardjito. *Peranan Wanita dalam Masa Pembangunan di Indonesia*. Jakarta: Ghalia Indonesia, 1979.
- Notosusanto, Nugroho. *Masalah Penelitian Sejarah Kontemporer*. Jakarta: Inti Idayu Press, 1984.
- Pujiati. *Kelestarian Perjuangan Kongres Wanita Indonesia (KOWANI): Analisis Pada Masa Kolonial Dan Pascakolonial*. Universitas Sains Malaysia, 2007.
- Rahardjo, Yulfita. "Perbedaan antar Studi Wanita dalam Pembangunan dan Studi Wanita". dalam T.O Ihromi (Ed). *Kajian Wanita dalam Pembangunan*. Jakarta: Yayasan Obor, 1995.
- Rahardjo, Yulfita. "Perbedaan antar Studi Wanita dalam Pembangunan dan Studi Wanita". dalam T.O Ihromi (Ed). *Kajian Wanita dalam Pembangunan*. Jakarta: Yayasan Obor, 1995.
- Ramage. *Percaturan Politik Di Indonesia; Demokrasi, Islam dan Ideologi Toleransi*, Terj. Hartono Hadikusumo. Yogyakarta: Mata Bangsa, 2002.
- Santoso, Priyo Budi. *Birokrasi Pemerintah Orde Baru*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1997.
- Scott, Joan W. *Gender: A Useful Category of Historical Analysis*. The American Historical Review, Vol. 91, No. 5. Dec., 1986.
- Setiawati, Nur Aini. "Sejarah Nasyyatul Aisyiyah di Kauman 1919-1965". Yogyakarta: UGM, 1985.
- Musdah, Siti Mulia dan Anik Farida. *Perempuan dan Politik*. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2005.
- Rosyidah, Ida. *Perempuan, kesetaraan dan keadilan*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007.
- Sjahruni, Asmah dkk. *50 Tahun Muslimat NU Berkhidmat untuk Agama dan Bangsa*
- Soenyono, *Teori-teori Gerakan Sosial*. Surabaya: Yayasan Kampusiana, 2005.
- Suharko. *Merajut Demokrasi Hubungan NGO, Pemerintah, dan Pengembangan Tata Pemerintahan Demokratis (1966-2001)*. Yogyakarta: Tiara Wacana, 2001.
- Suryakusuma, Julia. *Agama, Seks dan Kekuasaan*. Jakarta: Komunitas Bambu, 2012.
- \_\_\_\_\_. *Ibuisme Negara*. Jakarta: Komunitas Bambu, 2011.

- Suryochondro, Sukanti. *Potret Pergerakan Wanita Indonesia*. Jakarta: Rajawali, 1984.
- T., Hull. and V, Hull. "Population and health Policies" dalam *The Oil Boom and After: Indoensian Economic Policy and Performance in the Soeharto Era*. Oxford: Oxford University, 1992.
- Tilly, Charless. *From Mobilitation to Revolution*. Reading: Addison Wesley, 1978.
- Turmudi, Endang. *Islam Dan Politik Dalam Krisis Masa Kini Dan Orde Baru*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2003.
- Wibisono, Darmawan. *Gerakan Sosial: Wahana Civil Society bagi Demokratisasi*. Jakarta: LP3ES, 2006.
- Wieringa, Saskia E. *Penghancuran Gerakan Perempuan di Indonesia*. Jakarta: Garba Budaya, 1999.
- \_\_\_\_\_. *Kuntilanak Wangi: Organisasi-Organisasi Perempuan Indonesia Sesudah 1950*. Jakarta: Kalyanmitra, 1998.
- Zuhr, Ny. Saifudin dkk. *Sejarah Muslimat NU*. Jakarta: PP. Muslimat NU, 1979.

#### **ARTIKEL/PAPER**

- Darwin, Muhajir. "Gerakan Perempuan di Indonesia dari Masa ke Masa," *Jurnal Ilmu Sosial dan Politik*. Vol 7 No 3 Maret 2004.
- Dewi, Machya Astuti. "Konteks Global dan Nasional Gerakan Perempuan di Masa Order Baru: Kelahiran dan Dinamika Gerakan Yasanti". *Disertasi, Program Pascasarjana Universitas Airlangga*. Surabaya (2006)
- Eko, Bambang Subiyanto & Sjamsiah Ahmad. "Pengawal Keadilan Melalui Konvensi." *Jurnal Perempuan*. 45, ISSN: 1410-153x, (Januari 2006)
- Fauzyah, Syifa. "Muslimat NU: Sejarah dan Respon Terhadap Program Keluarga Berencana (Studi Kasus: Muslimat NU Jakarta Selatan Periode 2010-2015)" . *Skripsi: Jurusan Sejarah dan Kebudayaan Islam Fakultas Adab Dan Humaniora Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta*: (2016)
- Handani, Lisa Novia Dkk. "Dinamika Produksi Beras Dan Pengaruhnya Terhadap Ketahanan Pangan Masyarakat Di Kabupaten Grobogan Tahun 1984-1988." *Journal of Indonesia History* (Oktober 2017)
- Jamal, Erizal dkk. "Reforma Agraria dan Masa Depan Pertanian." *Jurnal Litbang Pertanian*. 21 No. 4 2002.

- Khoirun Nida, Fatma Laila. "Penegakan Hak Reproduksi Perempuan dalam Kebijakan Keluarga Berencana di Indonesia". *PALASTREN*. Vol.3 2013.
- Komnas Perempuan "Kekerasan terhadap perempuan di Indonesia" *Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan (Komnas Perempuan)*
- Kusumastuti, Emmi. "Gerakan Muslimat Nahdlatul 'Ulama Di Daerah Istimewa Yogyakarta". *Skripsi, Sejarah Dan Kebudayaan Islam Fakultas Adab UIN Sunan Kalijaga* (2009)
- Pujiati, "Kelestarian Perjuangan Kongres Wanita Indonesia (Kowani): Analisis Pada Masa Kolonial dan Pascakolonial," *Universitas Sains Malaysia* (2007)
- Rahayu, Ruth Indiah. "Militerisme Orde Baru dan Ideologi Koncowingking (Pengakuan Ideologi Perempuan Indonesia Secara Pemaknaan Ksatria Jawa." Ditulis untuk keperluan "Konferensi Warisan Otoritarian di Indonesia", 17-19 November 2005 di Yogyakarta, dalam rangka Dies Natalis ke-50 Universitas Sanata Dharma, kerjasama ELSAM-PUSDEP Sanata Dharma-ISSI
- Sri Wiyanti Eddyono, "Tantangan Feminis Dalam Membangun Aliansi Dengan Gerakan Perempuan dan Gerakan Sosial lainnya di Indonesia," *WEMC-Indonesia* (Maret 2010).
- Suhenti, Lolly. "Edisi Kami Punya Sejarah". *Jurnal Perempuan*, Jakarta, (2007).
- Marisna Ajeng Nerly Primasanti, Septina Alrianingrum. "Kritik Sosial Politik Lagu-Lagu Iwan Fals Pada Masa Orde Baru" *AVATARA, E-Journal Pendidikan Sejarah*. Vol 5 No. 3 Oktober 2017.
- Simanjuntak, Jhony Nelson. "Membela Korban Pembangunan Waduk Kedung Ombo," *ELSAM: Lembaga Studi & Advokasi Masyarakat Koleksi Pusat Dokumentasi Elsam*.
- Syamsiyatun, Siti. "Muslim Women's Politics in Advancing their Gender Interests: A Case-Study of Nasyiatul Aisyiyah in Indonesian New Order Era," *Al-Jami'ah*, Vol. 45, No. 1, 2007.
- W. Hafidz . Taslim A. dan Aripurnami S " Family Planing program in Indonesia: a Plight for policy reorientation" makalah disampaikan dalam konfrensi internasional NGO di Washington. 1991.
- Wulan, Tyas Retno. "Pemetaan Gerakan Perempuan di Indonesia dan Implikasinya Terhadap Penguatan Public Sphere di Pedesaan," *Yin Yang: Jurnal Studi Gender dan Anak* Vol. 3 No.1 Jan-Jun 2008.
- Yuliati, Ida. "Sejarah Organisasi Aisyiah dan Perannya dalam Pangkatan Derajat Kaum Wanita di Samping Tahun 1967-1997" *Skripsi Jurusan Ilmu Social Sejarah, Universitas Negeri Semarang*. 2005.

Widiyaning, Adistia Restuana. "Peranan PKK dan Pengaruhnya Terhadap Kondisi Sosial Ekonomi Perempuan di Kota Semarang Tahun 1972-1998," *Skripsi S1: Universitas Negeri Semarang*. 2013

Akta Notaris berdirinya Yayasan Annisa Swasti.

## 2. RUJUKAN WEB

<https://www.kompasiana.com/nisarangkuti/5500ae248133116619fa7b90/swasembada-beras-pada-masa-ordebaru-sebuah-perspektif-dari-sisienforcementnegara>

<http://www.rifka-annisa.org/>.

Ulasan menarik tentang peristiwa terbunuhnya Marsinah lihat <https://tirto.id/pembunuhan-buruh-marsinah-dan-riwayat-kekejian-aparat-orde-baru-cJSB>, 7 Agustus 2018

<https://tirto.id/pembunuhan-buruh-marsinah-dan-riwayat-kekejian-aparat-orde-baru-cJSB>/diakses 8 Agustus 2018

[https://www.kompasiana.com/asrinayuni/kasus-Marsinah\\_54f5d2f2a33311d6508b45b4](https://www.kompasiana.com/asrinayuni/kasus-Marsinah_54f5d2f2a33311d6508b45b4), diakses pada tanggal 4 januari 2018

<https://rezakarly.wordpress.com/2015/03/22/pelanggaran-ham-terhadap-Marsinah/>, diakses pada tanggal 4 januari 2018

## 3. DAFTAR NARASUMBER

Wawancara Amin Muftiyah Direktur Yayasan Annisa Swasti pada 9 Maret 2018 di kantor Yasanti

Wawancara Choiratun Chisaan aktivis Gerakan Perempuan Muslimat pada 26 Februari 2018 di rumah responden Maguwoharjo

Wawancara dengan Suwanti Angesti Rahayu Pengurus dan Pendiri Rifka Annisa pada 20 Maret 2018 dan 18/8/2018 di kantor Rifka Annisa

Wawancara AP. Muniarti ketua GAKTPI di rumah responden pada 18 Februari 2018

Wawancara Siti Syamsiyatun aktivis Nasyyiatul 'Aisyiyah pada 11 Juli 2018 di kampus UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta